



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHMI RIZAL
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 263238

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.573.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000
5. Tanah Seluas 369 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 3975 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 175.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 21.396.570

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.794.396.570

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.794.396.570



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.